

Etika Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Perspektif Bisnis Islam

Anita Dwiutami Handayani ^{*1}

Albi Bintang Pratama ²

M. Aditya Saputra ³

Diah Mukminatul Hasimi ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

*e-mail: dwianita364@gmail.com ¹, albibintang64@gmail.com ², maditiyasaputra4@gmail.com ³,
diahmukminatul@radenintan.ac.id ⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika dalam Islam yang menjadi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai referensi seperti buku akuntansi syariah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta standar PSAK Syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam menekankan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi sebagai fondasi utama dalam pelaporan keuangan. Nilai-nilai tersebut bertujuan memastikan informasi keuangan disajikan secara benar, tidak dimanipulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi kepentingan semua pihak. Selain itu, laporan keuangan syariah tidak hanya menekankan akurasi informasi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan unsur penipuan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa etika dalam bisnis Islam memiliki peran penting dalam membangun praktik pelaporan keuangan syariah yang akuntabel, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Kata Kunci: Etika Penyusunan; Keuangan Syariah; Template Bisnis Islam

Abstract

This study aims to examine the ethical principles in Islam that form the basis for the preparation and presentation of Islamic financial reports. The method used is a literature study by analyzing various references such as Islamic accounting books, scientific journals, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and relevant Islamic Financial Accounting Standards (PSAK) standards. The results show that Islamic business ethics emphasizes the values of honesty, trustworthiness, fairness, and transparency as the main foundations of financial reporting. These values aim to ensure that financial information is presented correctly, is not manipulated, and can be accounted for to protect the interests of all parties. Furthermore, Islamic financial reports emphasize not only information accuracy but also compliance with Islamic principles such as freedom from usury, gharar, and fraud. Overall, this study confirms that ethics in Islamic business plays a crucial role in establishing Islamic financial reporting practices that are accountable, transparent, and based on divine values.

Keywords: Ethics of Compilation; Islamic Finance; Islamic Business Template

PENDAHULUAN

Etika dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama dalam konteks ekonomi Islam (Heriyanto, 2024). Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas pengelolaan harta dan sumber daya yang dipercayakan. Dalam perspektif bisnis Islam, penyusunan laporan keuangan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus selaras dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur manipulasi atau ketidaktransparanan.

Etika penyusunan laporan keuangan syariah memiliki kedudukan strategis dalam menjaga integritas lembaga bisnis Islam. Transparansi dan kejujuran dalam penyajian data keuangan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT. Setiap angka yang tertulis dalam laporan keuangan harus menggambarkan kondisi nyata tanpa rekayasa yang dapat menyesatkan pihak lain. Dengan demikian, laporan keuangan syariah menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan dan keberkahan (Asiam, 2020). Selain itu, penerapan etika dalam laporan keuangan juga berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Laporan keuangan yang disusun secara etis mampu mencerminkan praktik bisnis yang halal, transparan, dan berkeadilan. Hal ini menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dan sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan amanah ekonomi umat.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai Etika Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dalam Perspektif Bisnis Islam menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya membahas aspek teknis penyusunan laporan, tetapi juga menyoroti nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasarinya. Melalui pemahaman etika dalam akuntansi syariah, diharapkan para pelaku bisnis dapat menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Etika dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama dalam konteks ekonomi Islam. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas pengelolaan harta dan sumber daya yang dipercayakan. Dalam perspektif bisnis Islam, penyusunan laporan keuangan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus selaras dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur manipulasi atau ketidaktransparanan (Syamani, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang membahas etika bisnis Islam, akuntansi syariah, dan standar laporan keuangan syariah. Data penelitian dikumpulkan dari buku-buku akuntansi syariah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, serta artikel dan dokumen akademik lain yang relevan. Beragam sumber ini menjadi dasar untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hubungan antara prinsip etika Islam dan praktik pelaporan dalam akuntansi syariah.

Analisis dalam penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan prinsip-prinsip etika Islam yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Setelah itu, prinsip-prinsip tersebut dibandingkan dengan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang berlaku. Proses penelitian mencakup tahapan pengumpulan literatur, pemilihan sumber yang kredibel, pencatatan konsep penting, dan penyusunan temuan secara sistematis agar hasil yang diperoleh akurat dan terstruktur.

Pemilihan metode studi pustaka didasarkan pada sifat penelitian yang konseptual dan normatif, sehingga kajian literatur menjadi pendekatan paling relevan. Melalui metode ini, penelitian mampu memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai penerapan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi dalam akuntansi syariah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menyajikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip etika Islam tidak

hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses penyusunan laporan keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah salah satu instrumen penting dalam dunia bisnis Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral dan spiritual. Ruang lingkup penyusunan laporan keuangan syariah mencakup seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan oleh entitas bisnis yang berbasis prinsip syariah, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, hingga ekuitas. Hal ini berbeda dengan laporan keuangan konvensional, karena setiap transaksi harus dikaji dari perspektif halal, bebas riba, tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) (Marlina, 2023).

Ruang lingkup laporan keuangan syariah mencakup berbagai jenis entitas, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah (takaful), lembaga keuangan mikro syariah, serta perusahaan komersial yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Setiap entitas ini diwajibkan menyusun laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang transparan dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, regulator, hingga masyarakat umum. Tujuan utama penyusunan laporan tersebut adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain menilai aspek finansial, laporan keuangan syariah juga menekankan penilaian terhadap kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah serta pelaksanaan tanggung jawab sosial. Hal ini membuat laporan keuangan syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan laporan keuangan konvensional, karena tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, laporan keuangan syariah berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan integritas, akuntabilitas, dan komitmen entitas terhadap prinsip syariah secara menyeluruh.

Etika dalam penyusunan laporan keuangan syariah merupakan bagian penting dari ruang lingkup pelaporan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap informasi yang disajikan wajib memenuhi prinsip kejujuran, kelengkapan, dan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya dari suatu entitas bisnis. Contohnya, pendapatan yang berasal dari aktivitas yang mengandung unsur riba, gharar, atau spekulasi tidak boleh dicatat sebagai pendapatan halal, melainkan harus dipisahkan dan dilaporkan dengan jelas. Ketelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, ruang lingkup laporan keuangan syariah tidak sekadar mencakup mekanisme teknis akuntansi, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai moral dan prinsip bisnis Islam. Proses penyusunan laporan harus dilakukan secara amanah, adil, dan bertanggung jawab agar dapat mencerminkan integritas entitas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal ini menegaskan bahwa laporan keuangan syariah memiliki peran yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa praktik bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga selaras dengan etika Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, penyajian laporan keuangan syariah harus memenuhi standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui PSAK Syariah. Standar ini mencakup pedoman bagaimana mencatat transaksi, menyajikan informasi keuangan, dan menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Ruang lingkupnya juga meliputi pengungkapan informasi tambahan seperti transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah, dana sosial (zakat, infak, sedekah), dan instrumen keuangan syariah lainnya. Dengan cakupan

yang jelas, laporan keuangan syariah menjadi alat yang tidak hanya mendukung pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memelihara integritas dan keberkahan bisnis.

Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah Perspektif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Dalam sistem keuangan Islam, setiap transaksi memiliki dasar dan karakteristik yang membedakannya dari sistem konvensional. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, seluruh transaksi dalam lembaga atau entitas syariah harus berlandaskan pada asas keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Tujuan utama dari asas ini adalah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga pada nilai-nilai etis dan moral sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, transaksi syariah tidak boleh mengandung unsur riba (*bunga*), *gharar* (*ketidakjelasan*), *maysir* (*spekulasi*), dan *zhulm* (*ketidakadilan*) (Triuwono, 2019).

Asas keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap praktik bisnis syariah karena memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan haknya tanpa adanya unsur *kedzaliman*. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang proporsional, tetapi juga melalui perlakuan yang setara dan transparan dalam setiap transaksi. Contohnya, pada akad *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai kesepakatan awal serta mencerminkan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, tidak boleh ada tindakan manipulatif, penipuan, atau rekayasa transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, prinsip kejujuran dalam penyampaian informasi keuangan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab moral dalam akuntansi syariah. Informasi yang disampaikan harus mencerminkan keadaan sebenarnya atau *faithful representation*, sebagaimana diatur oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Artinya, laporan keuangan harus bebas dari unsur rekayasa, bersifat transparan, dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Dengan menegakkan prinsip keadilan dan kejujuran ini, entitas bisnis syariah dapat menjaga integritas serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

Selain asas keadilan, asas kemaslahatan juga merupakan pilar penting dalam transaksi syariah karena mencakup manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi atau korporasi, tetapi harus memberikan nilai tambah bagi umat. Dengan demikian, setiap transaksi dalam sistem ekonomi syariah harus diarahkan untuk menciptakan manfaat yang lebih luas dan menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.

Dalam praktik akuntansi syariah, asas kemaslahatan diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan transaksi yang mencerminkan kontribusi sosial perusahaan. Hal ini termasuk pembayaran zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan lainnya yang menjadi bagian dari tanggung jawab sosial entitas. Kehadiran informasi tersebut menjadikan laporan keuangan syariah bukan hanya alat untuk menilai kinerja finansial, tetapi juga sebagai indikator keberlanjutan moral dan sosial perusahaan dalam memenuhi amanah syariah.

Menurut IAI, karakteristik transaksi syariah harus mencerminkan nilai-nilai etika Islam sejak tahap niat, proses akad, hingga pelaporan keuangannya. Setiap transaksi wajib memiliki kejelasan objek (*ma'qud 'alaihi*), kesepakatan yang jelas di antara para pihak (*sighat al-aqd*), serta kepastian mengenai manfaat dan risiko yang ditimbulkan. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan atau *an-taradhin minkum*, sehingga tidak ada paksaan atau tekanan yang dapat menyalahi prinsip syariah.

Karakteristik lainnya adalah adanya larangan terhadap praktik eksploitasi, monopoli, dan segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Dalam sistem syariah, keuntungan ekonomi harus sejalan dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti setiap transaksi tidak hanya mengejar profit, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi syariah dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang beretika, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak (Hanefah, 2013).

Dengan demikian, asas dan karakteristik transaksi syariah menurut IAI tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teknis dalam akuntansi, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan seluruh aktivitas pelaku bisnis Islam. Prinsip-prinsip seperti kejelasan akad, keseimbangan manfaat dan risiko, serta larangan gharar dan riba menjadi dasar untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Etika dalam transaksi bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari sistem ekonomi syariah yang menuntut pelaku bisnis untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dengan menegakkan asas-asas ini, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari segi profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana transaksi tersebut menjaga hak-hak para pihak dan menghindarkan mereka dari ketidakadilan.

Apabila asas dan nilai etika ini diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap transaksi hingga penyusunan laporan keuangan, maka laporan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar akuntansi secara formal, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan moral. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip syariah mencerminkan integritas pelaku usaha dalam menjaga kejujuran informasi, meminimalkan penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas kepada masyarakat dan Allah SWT. Hal ini menjadikan laporan keuangan syariah tidak hanya sebagai instrumen informasi ekonomi, tetapi juga sebagai wujud ibadah yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan asas transaksi syariah berperan besar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Asumsi Dasar dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah tidak hanya menjadi alat komunikasi keuangan antara entitas dan pemangku kepentingan, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT dan masyarakat. Setiap informasi yang disajikan harus menggambarkan kejujuran, amanah, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Karena itu, penyusunannya harus berlandaskan asumsi dasar dan nilai etika Islam yang melarang riba, gharar, penipuan, serta menuntut transparansi dalam setiap tahap pelaporan.

Menurut PSAK Syariah yang diterbitkan oleh IAI, laporan keuangan harus mencerminkan keadilan, disusun secara amanah, dan mampu memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif seperti relevansi, representasi yang setia, dan keterpahaman menjadi acuan utama agar laporan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial entitas. Dengan demikian, laporan keuangan syariah berperan penting dalam memastikan praktik bisnis tetap etis, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Asumsi dasar dalam laporan keuangan syariah mencakup beberapa prinsip penting, di antaranya kesatuan usaha (*business entity*), kelangsungan usaha (*going concern*), dan dasar akrual (*accrual basis*). Namun, dalam konteks syariah, asumsi-asumsi tersebut dipahami dengan nilai-nilai moral Islam. Misalnya, kesatuan usaha bukan hanya memisahkan harta entitas dari harta pribadi pemilik, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh aset adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan transparansi. Prinsip kelangsungan usaha pun tidak semata-mata menilai kemampuan entitas bertahan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah merupakan elemen yang menentukan sejauh mana informasi yang disajikan dapat dipercaya dan berguna. Menurut IAI, empat karakteristik utama adalah relevansi, keandalan (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Dalam perspektif syariah, keempatnya harus dijalankan tanpa mengorbankan nilai kejujuran dan keadilan. Informasi dikatakan relevan apabila dapat membantu pengguna dalam menilai tanggung jawab pengelolaan dana, baik dana komersial maupun sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Keandalan berarti laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan penyimpangan, serta menggambarkan kondisi yang sesungguhnya bukan yang ingin ditampilkan demi citra baik perusahaan (Qodari, 2025).

Selain itu, laporan keuangan syariah harus memiliki tingkat keterbandingan yang memadai, baik antarperiode maupun antarentitas, agar pengguna dapat menilai kinerja serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah secara objektif. Keterbandingan ini hanya dapat dicapai apabila penyajian data dilakukan secara konsisten, terbuka, dan mengikuti standar yang berlaku. Dengan demikian, pengguna laporan dapat memahami perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu dan menilai apakah entitas benar-benar menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, karakteristik keterpahaman menuntut agar informasi dalam laporan keuangan disajikan secara jelas, tidak berbelit, dan mudah dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat awam yang ingin mengetahui transparansi pengelolaan dana syariah. Nilai transparansi ini juga memiliki dimensi spiritual karena mencerminkan sikap jujur (*shiddiq*), salah satu sifat utama yang sangat ditekankan dalam Islam. Dengan menyajikan laporan secara terbuka dan mudah dipahami, entitas tidak hanya memenuhi persyaratan teknis akuntansi, tetapi juga menunjukkan komitmen moral dalam menjaga amanah publik.

Penerapan asumsi dasar dan karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan syariah membuat proses pelaporan tidak sekadar memenuhi standar teknis akuntansi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam etika bisnis Islam. Ketika laporan disusun dengan memperhatikan aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman, lembaga keuangan syariah dapat menunjukkan transparansi, integritas, serta komitmen untuk menjaga amanah publik. Hal ini tidak hanya membantu pengguna laporan mengambil keputusan ekonomi yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dijalankan sesuai prinsip syariah.

Akhirnya, penyusunan laporan keuangan dalam konteks syariah bukan sekadar kegiatan administratif atau kewajiban formal, melainkan bagian dari ibadah profesional. Proses pelaporan mencerminkan upaya untuk menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan menghadirkan informasi yang benar dan dapat dipercaya, entitas menunjukkan tanggung jawabnya tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT, sehingga laporan keuangan menjadi wujud nyata integritas dan etika dalam praktik bisnis syariah.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan Syariah

Unsur-unsur laporan keuangan syariah merupakan komponen utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas berbasis syariah. Setiap unsur tidak hanya memiliki makna finansial, tetapi juga dimensi moral yang mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Secara umum, laporan keuangan syariah memuat unsur-unsur seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, serta unsur khusus seperti zakat, infak, sedekah, dan qardhul hasan. Semua unsur tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK Syariah (Muchlis, 2024).

Aset dalam laporan keuangan syariah dipahami sebagai sumber daya yang dikuasai entitas akibat peristiwa masa lalu dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan, selama manfaat tersebut berasal dari aktivitas yang halal. Namun, dalam pandangan Islam, aset tidak dianggap sebagai kepemilikan absolut manusia, melainkan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Karena itu, setiap aset harus dipelihara, dikelola, dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai kehati-hatian dan etika dalam pengelolaannya.

Dalam praktik bisnis syariah, penggunaan aset wajib menghindari kegiatan yang mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), maupun *maysir* (perjudian), karena ketiga hal tersebut dapat merusak keadilan dan merugikan pihak lain. Dengan menjauhi aktivitas yang dilarang tersebut, pengelolaan aset tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membawa keberkahan dan nilai spiritual. Prinsip ini memastikan bahwa kekayaan yang dikelola entitas tetap berada dalam koridor halal, memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga integritas moral dan spiritual dalam kegiatan bisnis.

Selanjutnya, kewajiban (*liabilitas*) dalam laporan keuangan syariah diartikan sebagai tanggung jawab entitas kepada pihak lain yang harus dipenuhi melalui pembayaran atau penyerahan jasa di masa mendatang. Dalam perspektif akuntansi, kewajiban menunjukkan komitmen finansial yang perlu dicatat secara jelas agar pengguna laporan memahami posisi keuangan entitas secara objektif. Namun, dalam syariah, kewajiban tidak hanya dipandang sebagai beban finansial, tetapi juga sebagai komitmen moral yang harus dijaga dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, setiap hutang wajib dibayar tepat waktu, dan menunda pembayaran padahal mampu melakukannya dianggap sebagai bentuk kezaliman. Karena itu, pencatatan kewajiban dalam laporan keuangan syariah memiliki dimensi etis: ia mencerminkan amanah, kejujuran, serta kesungguhan entitas dalam memenuhi janji kepada pihak lain. Dengan menyajikan informasi kewajiban secara transparan, entitas menunjukkan akuntabilitasnya, baik secara finansial maupun moral, sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan tetap berada dalam koridor keadilan dan integritas sesuai prinsip-prinsip Islam.

Ekuitas dalam laporan keuangan syariah menggambarkan hak pemilik atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang harus ditanggung entitas. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, ekuitas tidak hanya dipahami sebagai hak finansial, tetapi juga sebagai konsep yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kebersamaan (*musyarakah*). Setiap pihak yang terlibat dalam suatu usaha memiliki kedudukan yang adil sesuai kontribusinya, baik berupa modal, tenaga, maupun keahlian. Dengan pendekatan ini, kepemilikan dalam bisnis tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menciptakan hubungan yang saling mendukung dan berlandaskan amanah.

Selain itu, konsep ekuitas dalam akuntansi syariah berkaitan erat dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam mekanisme ini, keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal dan kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini membedakan sistem syariah dari praktik konvensional yang sering kali lebih menguntungkan pemilik modal besar. Dengan menerapkan konsep bagi hasil, akuntansi syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, sehingga kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Unsur berikutnya adalah pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*). Pendapatan dalam laporan keuangan syariah hanya dapat diakui jika berasal dari aktivitas yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah, seperti hasil dari jual beli yang sah (*murabahah*), bagi hasil usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*), atau imbalan jasa (*ijarah*). Sementara itu, beban adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, termasuk biaya operasional dan tanggung jawab sosial seperti zakat perusahaan. Etika penyajian pendapatan dan beban mengharuskan transparansi penuh agar tidak ada manipulasi yang menyesatkan pihak luar.

Tabel 1. Unsur Laporan Keuangan syariah

No	Unsur Laporan Keuangan Syariah	Pengertian	Makna Dalam Perspektif Islam
1	Aset (<i>Assets</i>)	Sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan.	Aset merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara halal dan produktif, serta tidak digunakan untuk aktivitas yang dilarang syariah.
2	Kewajiban (<i>Liabilitas</i>)	Kewajiban entitas untuk menyerahkan sumber daya ekonomi di masa depan akibat transaksi masa lalu.	Mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial; hutang harus diselesaikan tepat waktu

			untuk menghindari kezaliman.
3	Ekuitas (<i>Equity</i>)	Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban	Menunjukkan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian sesuai prinsip musyarakah atau mudharabah.
4	Pendapatan (<i>Revenue</i>)	Arus masuk manfaat ekonomi yang meningkatkan ekuitas, selain dari kontribusi pemilik.	Hanya pendapatan dari kegiatan halal yang dapat diakui; bebas dari riba, gharar, dan maysir.
5	Beban (<i>Expense</i>)	Pengeluaran atau penurunan manfaat ekonomi selama periode tertentu untuk menghasilkan pendapatan.	Pengeluaran harus efisien, jujur, dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat serta sesuai syariah.
6	Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)	Dana sosial yang wajib atau sunnah dikeluarkan oleh entitas sesuai ketentuan syariah.	Mencerminkan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat.
7	Qardhul Hasan	Pinjaman kebajikan tanpa bunga yang diberikan untuk membantu pihak lain.	Wujud nyata solidaritas dan kasih sayang sosial, memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan syariah.

Selain unsur-unsur utama seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, laporan keuangan syariah juga menampilkan berbagai unsur sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan qardhul hasan. Zakat, misalnya, bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen ekonomi yang berfungsi mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil di masyarakat. Melalui zakat, entitas menunjukkan komitmen sosialnya dalam membantu fakir miskin dan kelompok yang kurang mampu. Demikian pula, pencatatan infak dan sedekah memperlihatkan kontribusi entitas dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, sehingga laporan keuangan syariah memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran sosial lembaga.

Sementara itu, qardhul hasan menjadi bukti nyata fungsi sosial lembaga syariah dalam memberikan pinjaman kebajikan tanpa bunga kepada pihak yang membutuhkan. Praktik ini mencerminkan nilai solidaritas, empati, dan kepedulian yang menjadi dasar ekonomi Islam. Pencantuman unsur sosial seperti zakat dan qardhul hasan dalam laporan keuangan menegaskan bahwa tujuan akhir bisnis syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Inilah yang membedakan laporan keuangan syariah dari laporan konvensional, karena ia menggabungkan aspek ekonomi, etika, dan spiritual dalam satu kesatuan yang utuh (Mutaufiq, 2024).

Dengan demikian, setiap unsur dalam laporan keuangan syariah saling berkaitan dan membentuk satu sistem nilai yang menyeluruh. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, serta dana sosial seperti zakat dan qardhul hasan, tidak hanya berfungsi sebagai komponen akuntansi, tetapi juga sebagai instrumen moral yang mencerminkan amanah serta tanggung jawab entitas dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam. Dengan menempatkan nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran sebagai landasan, laporan keuangan syariah memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan memiliki dimensi etis dan spiritual. Sistem pelaporan ini tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan secara objektif, tetapi juga menunjukkan sejauh mana entitas menjaga

integritasnya, mematuhi prinsip syariah, serta menjaga hubungan yang harmonis antara kepentingan individu dan masyarakat.

Etika dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah menjadikan lembaga keuangan tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tetapi juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan umat. Melalui pelaporan yang amanah, entitas menunjukkan perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, seperti keberkahan, keadilan sosial, dan pemerataan manfaat. Dengan pendekatan ini, laporan keuangan syariah berfungsi sebagai wujud komitmen lembaga untuk menjaga keberlangsungan ekonomi yang tidak hanya stabil secara finansial, tetapi juga membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat luas. Pendekatan holistik inilah yang membedakan lembaga keuangan syariah dari entitas konvensional, karena setiap aspek pelaporannya selalu diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika dalam Islam memiliki peran fundamental dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi menjadi fondasi utama yang memastikan informasi keuangan disajikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa laporan keuangan syariah tidak hanya menekankan aspek teknis akuntansi, tetapi juga mengikat penyusun dan penyajinya pada tanggung jawab moral dan spiritual. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mampu menciptakan praktik pelaporan yang tidak hanya akurat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bebas riba, gharar, dan unsur penipuan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berbasis studi pustaka, sehingga belum menggambarkan tantangan implementasi etika syariah dalam praktik nyata di berbagai entitas bisnis.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan melakukan penelitian lapangan untuk melihat bagaimana prinsip etika Islam diterapkan dalam praktik penyusunan laporan keuangan di lembaga keuangan syariah maupun entitas bisnis lainnya. Observasi empiris tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kendala, efektivitas, dan tingkat kepatuhan entitas terhadap PSAK Syariah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengevaluasi sejauh mana unsur-unsur sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan qardhul hasan diolah dan disajikan secara konsisten dalam laporan keuangan. Dengan demikian, kajian etika akuntansi syariah ke depan dapat menjadi lebih komprehensif dan berkontribusi memperkuat praktik pelaporan keuangan yang tidak hanya profesional, tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiam, S. (2020). *ETIKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ; DITINJAU. 3*(November), 128–136.
- Hanefah, A. M. S. dan M. M. (2013). "The Need of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence from AAOIFI." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(1).
- Heriyanto, T. (2024). "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (1), 24–37.
- Marlina, N. (2023). "ANALYSIS OF THE BASIC FRAMEWORK FOR THE PREPARATION AND PRESENTATION OF SHARIA ENTITY FINANCIAL STATEMENTS (KDPPLKS): A LITERATURE REVIEW." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9 (1).

Muchlis, S. (2024). *AKUNTANSI SYARIAH: Konsep Dan Praktik Dalam Era Kontemporer*. Pustaka Peradaban.

Mutaufiq, A. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Qodari, A. (2025). *AKUNTANSI SYARIAH*. CV Rey Media Grafika.

Syamani, M. (2025). "Konseptualisasi Laporan Keuangan Pada Entitas Syariah Non-Profit: Studi Pustaka Atas Peran Akuntabilitas Dan Etika Islam." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(6).

Triyuwono, I. (2019). "SO, WHAT IS SHARIA ACCOUNTING?" *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1 (1).